

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana tambahan pendapatan masyarakat dalam setiap periodenya. Adapun suatu perekonomian dapat dikatakan tumbuh jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah Produk Regional Domestik Bruto (PDRB). Menurut Todaro (2004) pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi barang pokok, peningkatan standar hidup secara ekonomi dan sosial.

Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing

dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2003).

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Selain sebagai penduduk terbanyak di Indonesia pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang berpusat di Pulau Jawa. Sehingga hal inilah yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Menurut Lili (2008) dalam Krinantiya, pertumbuhan ekonomi yang cepat maka akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Berikut terdapat data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Gini Ratio di Pulau Jawa seperti table berikut :

**Tabel 1.1**

**Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2013**

PROVINSI	2011	2012	2013
JAWA BARAT	0.41	0.41	0.41
JAWA TENGAH	0.38	0.38	0.38
DIY	0.40	0.43	0.43
JAWA TIMUR	0.37	0.36	0.36
BANTEN	0.40	0.39	0.39
DKI JAKARTA	0.44	0.42	0.43

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari table 1.1 diketahui tiga tahun terakhir indikator untuk mengukur ketimpangan suatu wilayah yaitu indeks gini di Pulau Jawa. Dapat dilihat bahwa ketimpangan yang ada di Provinsi Jawa Timur paling rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa, mengingat angka indek gini yaitu 0 sampai 1 yang mana 0 menunjukkan pemerataan dan 1 menunjukkan ketimpangan. Indeks gini Jawa Timur sebesar 0,37 pada tahun 2011 dan mengalami kenaikan menjadi 0.36 tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 0.36. selain itu , ketimpangan terbesar di Pulau Jawa berada di Provinsi DKI Jakarta.

Selain pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak melihat perubahan penduduk dan struktur ekonomi, ketimpangan juga dapat terjadi akibat perbedaan kondisi demografi yang besar antar wilayah. Menurut Syafrizal (1997), kondisi demografis dalam suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari penduduk, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan serta perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat di suatu daerah.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil juga dengan melihat taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM inilah yang menentukan tinggi atau rendahnya produktivitas penduduk. Semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk dan sebaliknya semakin rendah IPM maka semakin rendah juga produktivitas penduduk.

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, pada table 1.2 menunjukkan bahwa IPM di Pulau Jawa terdapat perbedaan. Berikut terdapat data IPM Pulau Jawa Tahun 2011-2013.

**Tabel 1.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia Pulau Jawa**  
**Tahun 2011-2013**

PROVINSI	2011	2012	2013
JAWA BARAT	72,73	73,11	73,58
JAWA TENGAH	72,94	73,36	74,05
DIY	76,32	76,75	77,37
JAWA TIMUR	72,18	72,83	73,54
BANTEN	70,95	71,49	71,90
DKI JAKARTA	77,97	78,33	78,59

Sumber : BPS Jawa timur Tahun 2013

Dilihat dari tabel 1.2 diatas bahwa Provinsi mengalami kenaikan IPM yang meningkat dari tahun 2011-2013. Kenaikan ini tidak terlalu besar tetapi sangat menentukan bahwa indeks pembangunan manusia di jawa timur semangkin membaik tiap tahunnya. Sehingga rata – rata penduduk di jawa timur mendapat kesejahteraan yang cukup meningkat.

Masalah kemiskinan merupakan hal yang sangat serius dan menjadi ketakutan tersendiri bagi daerah yang kondisi perekonomiannya yang masih tertinggal. Strategi pembangunan yang berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi tidak selalu di ikuti oleh penurunan kemiskinan, bahkan sebaliknya dapat diikuti oleh membengkaknya kemiskinan. Selain itu usaha peningkatan kesejahteraan rakyat yang hanya mengandalkan kemampuan fisik tanpa diikuti oleh perubahan pola pikir akan menjadikan masyarakat tidak memiliki pandangan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dilakukan melalui *human investment*.

Kemiskinan mengindikasikan bahwa sebagian anggota masyarakat yang belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai. Akibatnya kelompok ini tidak mendapat manfaat dari proses pembangunan.

PDRB per kapita merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu provinsi, dimana jika semakin besar PDRB per kapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan semakinburuk tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih

tinggi karena sumberdaya yang potensial terus berpindah ke daerah maju sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah pusat pertumbuhan mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih tinggi karena didukung oleh sumberdaya potensial yang telah berpindah tersebut.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang mana Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terbanyak dan terpadat di Indonesia, sehingga hal ini yang membuat penulis mengangkat topik tentang ketimpangan yang ada di Jawa Timur pada khususnya, Indonesia pada umumnya, karena variabel-variabel tersebut saling mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga penulis mengangkat judul skripsi **“ANALISIS PENGARUH IPM, PDRB DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 1998 - 2014”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur terhadap Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur terhadap Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur?

3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran di Jawa Timur terhadap Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan di provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap ketimpangan di provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap ketimpangan di provinsi Jawa Timur.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Pengambil Kebijakan

Untuk pengambil kebijakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai variabel terkait yang mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah sehingga dapat lebih jauh mengambil kebijakan selanjutnya dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ketimpangan di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya.

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu pengetahuan dan dapat melengkapi kajian ketimpangan wilayah



dengan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah ini.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang unsure-unsur penelitian yang memuat penelitian-penelitian terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Bab ini juga berisi teori-teori yang mendasari dilakukannya penelitian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan hipotesis mengenai penelitian.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang jenis dan sumber data, menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan agar bisa mengoperasionalkan di dalam penelitian dan

membahas metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai data penelitian , menyajikan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data. Bab ini juga membahas semua temuan-temuan dari hasil penelitian analisis.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bagian bab sebelumnya. Simpulan ini juga harus telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan implikasi sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga pada bab ini dapat ditarik dari implikasi teoritis dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI**

## 2.1 Kajian Pustaka

Riska Dwi Astuti (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013” dengan variabel dependen adalah ketimpangan distribusi pendapatan DIY, dan variabel independen Sumber Daya Alam, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita dan Populasi. Penulis menggunakan metode analisis data panel dengan hasil variabel SDA tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY, IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan DIY, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan DIY, dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan DIY.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hidayat (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Taun 2005-2012” peneliti menggunakan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, IPM dan variabel dependen adalah ketimpangan pendapatan antar daerah. Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, variabel investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan d Jawa Tengha dan variabel IPM

berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa tengah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Budiantoro (2008), dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah” dengan variabel Investasi, Angkatan Kerja (AK) dan Alokasi Dana Bantuan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bawa kenaikan nvestasi akan menyebabkan ketimpangan menurun, peningkatan jumlah AK yang diimbangi dengan kesempatan kerja akan menurangi ketimpangan dan alokasi dana banuan tidak merata akan meningkatkan ketimpangan.

Penelitian yang terkait juga dilaukan oleh Yuki (2010), dengan judul penelitian “Analisis Ketimpangan Pembangunan wilayah di DKI Jakarta Tahun 1995-2008” dengan variabel PDRB perkapita, Investasi, Aglomerasi dan Desentralisasi Fiskal, hasil dari penelitian inia dalah hipotesis Kuznets Kurva U-terbalik berlkau untuk Provinsi DKI Jakarta.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2004), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang.

a) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Kaum klasik mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, luas tanah dan kekayaan alam, jumlah stok barang-barang modal dan teknologi yang digunakan. Adapun kaum klasik mengemukakan pendapatnya seperti :

1. Adam Smith, mengemukakan doktrinyya tentang sistem bebas berusaha dimana campur tangan pemerintah adalah minimal, menurut kaum klasik bisa menjamin tercapainya :
  - Alokasi sumber-sumber alam dan faktor-faktor produksi lain diantara berbagai macam kegiatan ekonomi secara efisien.
  - Tingkat kegiatan ekonomi nasional yang optimal.
2. Robert Malthus mengemukakan bahwa penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi . Malthus memiliki pandangan yang berbeda dengan sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Smith mengenai peranan dari jumlah penduduk. menurut Smith perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena dapat memperluas pasar, namun menurut Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam satu generasi sehingga dapat menurunkan kembali tingkat pembangunan ekonomi ke lebih rendah. (Sukirno,2004)

b) Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Harod-Domar

Teori ini melengkap teori yang sebelumnya dikemukakan oleh Keynes dalam jangka pendek (statis) dan Harod-Domar dalam jangka panjang(dinamis). Teori Harod-Domar didasarkan pada asumsi sebagai berikut :

1. Perekonomian bersifat tertutup
2. hasrat untuk menabung ( $MPS=s$ ) adalah konstan
3. proses produksi memiliki koefisien yang tetap serta pertumbuhan penduduk angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Tarigan,2005)

Berdasarkan ketiga asumsi diatas, maka Harod-Domar membuat kesimpulan bahwa pertumbuhan jangka panjang (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai jika terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = k = n$$

keterangan :

$g$  = growth (tingkat pertumbuhan output)

$k$  = capital (tingkat pertumbuhan modal)

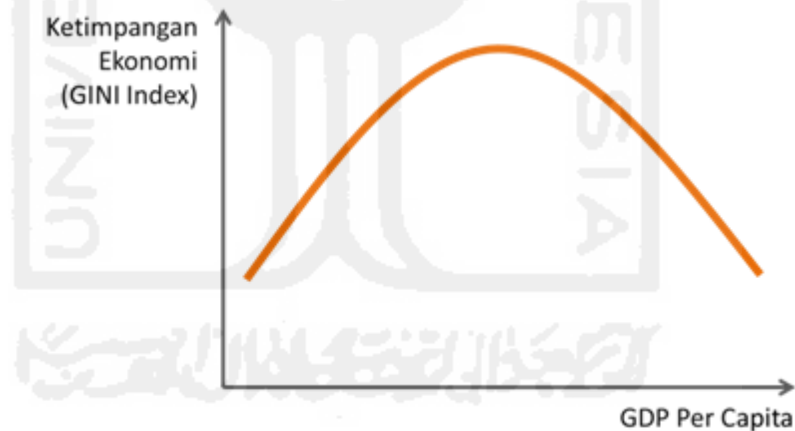
$n$  = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

### **2.2.2 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Adapun tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, namun pada kenyataannya adalah terdapat masalah yang berkaitan dengan tidak meratanya kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain terjadinya ketimpangan.

Terdapat hipotesis Kuznetss pada tahun 1995 yang meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di Negara maju dan hasil dari penelitian Kuznetss adalah adanya hubungan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang jika disajikan dalam kurva akan membentuk U-terbalik seperti berikut :



**Gambar 2.1 Kurva Kuznets**

Jika di amati kurva Kuznets tersebut maka dapat dikatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi itu akan diikuti dengan membruuknya distribusi pendapatan, hal ini kana terus terjadi sampa

pada titik dimana pertumbuhan ekonomi diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan.

### **2.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan**

Menurut Kuncoro, pertumbuhan ekonomi secara langsung atau secara tidak langsung akan berpengaruh pada masalah ketimpangan. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kuznets, menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara pertumbuhan dan ketimpangan. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi akan cenderung menyebabkan meningkatnya ketimpangan yang diakibatkan belum meratanya pendapatan, tetapi setelah tahapan awal terlewati dan memasuki tahapan selanjutnya pemerataan akan semakin tercapai dan ketimpangan akan semakin menurun yang berbentuk kurva U terbalik.

### **2.2.4 Pengertian Ketimpangan Pendapatan**

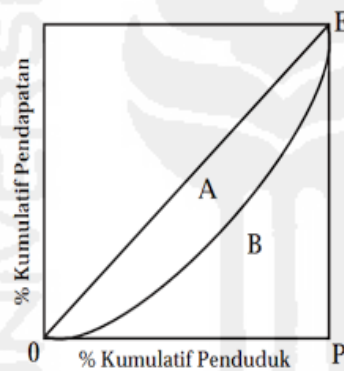
Masalah kesenjangan pendapatan sering juga diikhtisarkan bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin (Bruce Herrick/Charles P Kindleberger, 1998 : 171).



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibat dari perbedaan itu maka akan terlihat kesenjangan yaitu yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk.

Adapun indikator untuk mengetahui ketimpangan dan kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan :

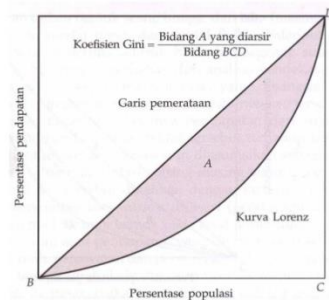
1) Kurva Lorenz



Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif yang actual antara persentase-persentase penerimaan penghasilan yang diterima. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal berarti semakin besar pula ketimpangan pendapatan yang terjadi dan sebaliknya semakin dekat Kurva Lorenz dengan garis diagonal maka akan semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi.

2) Koefisien Gini

### 3) Koefisien gini dan ukuran ketimpangan pendapatan



Gambar 3. Memperkirakan Koefisien Gini

Koefisien gini adalah persamaan ukuran ketimpangan dan bisa berbeda-beda dari nol yang berarti pemerataan sempurna sampai satu yang berarti ketimpangan total dalam distribusi pendapatan dan pengeluaran.

#### 2.2.5 Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM digunakan untuk mengukur dan membandingkan angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup semua Negara seluruh dunia dan IPM juga dapat digunakan sebagai alat mengukur ketimpangan daerah. kategori IPM yang dikeluarkan oleh UNDP ada empat kategori yaitu Rendah jika  $IPM < 50$ , Menengah bawah bila  $50 < IPM < 66$ , menengah atas jika  $66 < IPM < 80$  dan tinggi jika  $IPM > 80$ .

Todaro dan Smith, 2004 memeringkat semua Negara atau daerah dari skala 0 (terendah) hingga 1 (tertinggi) dengan tiga tujuan akhir IPM :

1. Masa hidup diukur dengan usia harapan hidup
2. Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis

3. Standar kehidupan yang di ukur dengan pendapatan rill perkapita.

Dari ketiga komponen diatas, terdapat metode perhitungan IPM :

$$IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)$$

$$X2 = 1/3 X12 + 2/3 X22$$

Keterangan :

$X1$  = lamanya hidup (tahun)

$X2$  = tingkat pendidikan  $2/3$  (melek huruf) +  $1/3$  (lama sekolah)

$X3$  = pendapatan rill per kapita (Rupiah)

$X12$  = rata-rata lama bersekolah (tahun)

$X22$  = angka melek huruf (persen)

### 2.2.6 Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makro ekonomi yang menunjukkan kinerja suatu perekonomian. Menurut BPS PDRB adalah besarnya nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Metode penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan :

1. Produksi : PDRB yang merupakan nilai balasa jasa yang dihasilkan oleh pemilik faktor produksi.
2. Pendapatan : PDRB yang merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi

3. Pengeluaran : PDRB merupakan penghitungan penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi.

### **2.2.7 Definisi Tingkat Pengangguran**

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. “Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia”, (Tambunan, 2001:60). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain : perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan kita. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi maupun nonekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan.

Secara umum pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai

nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di Indonesia, sejak tahun 1998 BPS menggunakan usia 15 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk usia kerja.

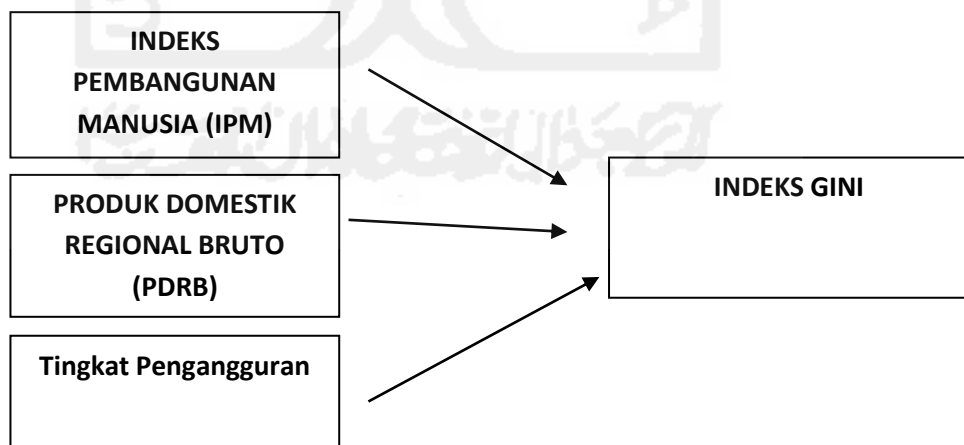
Menurut Sumarsono (2009: 2-3): "Tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang yang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau *manpower*. Secara singkat tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*). Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ataupun labour force terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan".

Angka pengangguran menurut (Sumarsono,2009:6), "adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk

yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur”.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses produksi, maka dapat dikatakan kesempatan kerja akan meningkat bila output meningkat. Sehingga perlu dirumuskan kebijakan yang memberi dorongan kepada perluasan kesempatan kerja agar alat-alat kebijakan ekonomi dapat mengurangi pengangguran. Kebijakan pembangunan daerah yang pada dasarnya mempunyai fungsi dalam perluasan kesempatan kerja apabila dilihat dari pembangunan daerah dan hubungan antara daerah. Pada hakekatnya tiap-tiap proyek pembangunan dilakukan dalam suatu daerah dan implementasinya harus menjadi komponen pembangunan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini dilakukan tiga variabel yang diduga berpengaruh terhadap indeks gini di Provinsi Jawa Timur. Dalam gambar

diatas, menunjukkan bahwa variabel independen terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (X1), PDRB (X2) dan populasi (X3) serta variabel dependen adalah Indeks Gini (Y). berdasarkan uraian diatas, hubungan masing-masing variabel independen terhadap indeks gini (variabel dependen adalah sebagai berikut :

**a. Indeks Pembangunan Manusia (X1)**

Seperti yang telah diketahui bahwa IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejatheraan masyarakat disuau wilayah atau daerah denagn mempertimbangkan tingkat pendidikan, kesehatan dsb untuk menentukan kesejateraan tersebut. Maka hubungannya dengan indeks gini adalah jika nilai IPM suatu wilayah tinggi, artinya kesejhateraan masyarakatnya juga tinggi dan ketika kesejahteraan masyarakat tersebut tinggi , dapat dikatakan bahwa semakin kecil ketidakmerataan di wilayah tersebut . ukuran ketidakmeraan di suat wilayah diukur dengan indikator nilai Indeks Gini. Ketika IPM tinggi maka Indeks Gini di wilayah tersebut akan semakin mendekati 0 (kemerataan sempurna).

**b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Setiap wilayah atau daerah pasti menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena cerminan sebuah wilayah yang maju adalah dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diiringi dengan kesejahteraan masyarakat maka akan meningkatkan ketimpangan di wilayah tersebut karena hanya

sebagian kecil saja masyarakat yang dapat menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Sehingga hal tersebut membuat hubungan yang sangat erat antar PDRB dan Indeks Gini.

c. **Tingkat Pengangguran**

Tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan. Hubungan antara tingkat pengangguran dengan ketimpangan ketika tingkat pengangguran naik maka ketimpangan akan juga meningkat. Dengan ini maka bisa dilihat bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan dengan ketimpangan.

**2.4 Hipotesis**

Dari uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis yang masih harus diuji kebenarannya.

- 1) Indeks Pembangunan Manusia diduga berpengaruh dan negatif terhadap Indeks Gini. Kenaikan IPM akan menurunkan Indeks Gini.
- 2) PDRB diduga berpengaruh dan dan negatif terhadap Indeks Gini. Kenaikan PDRB akan menurunkan Indeks Gini.
- 3) Tingkat Pengangguran diduga berpenaruh dan positif terhadap Indeks Gini. Kenaikan tingkat pengangguran akan menaikkan Indeks Gini.